

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan isu global yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tetapi juga berperan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi serta stabilitas nasional. Ketahanan pangan yang tidak terjaga dapat memicu ketimpangan sosial dan meningkatkan potensi konflik di suatu negara. Dalam konteks ini, ketersediaan (availability) dan aksesibilitas (accessibility) pangan menjadi dua aspek utama yang menentukan sejauh mana suatu negara mampu memastikan ketahanan pangannya. Sektor pertanian global berperan dalam menjamin produksi pangan, sementara faktor sosial-politik seringkali menjadi hambatan utama dalam distribusi dan akses pangan yang merata. Stabilitas politik suatu negara berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, di mana negara yang lebih demokratis cenderung lebih memprioritaskan upaya mengatasi tantangan kerawanan pangan. Sebaliknya, instabilitas politik, kebijakan yang tidak konsisten, konflik internal, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim dan ketegangan geopolitik dapat menghambat rantai pasokan pangan, yang pada akhirnya memicu kelangkaan pangan, inflasi, bahkan krisis sosial (Bender & Buchanan-Smith, 1997).

Salah satu negara yang mengalami tantangan ketahanan pangan yang kompleks adalah Korea Utara. Meskipun bukan negara dengan tingkat kerawanan pangan terburuk, laporan dari Organisasi Pangan dan

Pertanian (FAO) serta Program Pangan Dunia (WFP) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 10,1 juta orang atau 40 persen dari populasi Korea Utara mengalami kerawanan pangan dan membutuhkan bantuan pangan (FAO & WFP, 2019). Kondisi ini diperparah oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah yang tertutup terhadap dunia internasional, yang membatasi akses terhadap informasi dan bantuan kemanusiaan. Meski Korea Utara tidak mengalami konflik internal besar, ketahanan pangannya tetap terancam akibat kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai, perubahan iklim, serta sistem politik yang memperburuk distribusi pangan secara adil. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah adanya sistem politik yang membatasi bantuan kemanusiaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih mengutamakan kepentingan elit pemerintahan dibanding kesejahteraan rakyatnya.

Sejarah mencatat bahwa Korea Utara telah mengalami krisis pangan berkepanjangan, termasuk periode "Arduous March" pada tahun 1990-an yang menyebabkan kelaparan massal akibat kombinasi bencana alam, kegagalan politik, serta runtuhnya Uni Soviet yang sebelumnya menjadi mitra ekonomi utama (Crossing Borders NK, 2019). Sejak saat itu, ketahanan pangan Korea Utara tetap menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan. Sementara itu dari segi ketersediaan pangan, data resmi melalui Komite Nasional DPRK kepada FAO, pada tanggal 23 Maret 2021 menunjukkan bahwa total produksi pertanian di tahun 2020 sebesar 5.523.118,80 ton. Produk ini setara dengan produksi sereal yang

memiliki rata-rata tahun 2012 hingga 2018 sebesar 5,542 juta ton atau kurang dari rekor produksi tahun 2019 sebesar 17%. Kurangnya persediaan modal pertanian, waduk, dan saluran irigasi di negara ini menjadi alasan utama kekeringan dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Petani lokal juga kurang diuntungkan karena sebagian besar tanahnya berupa pegunungan, rasio penduduk terhadap lahan subur tinggi, iklim yang relatif dingin, dan banjir. Sehingga dalam praktiknya membatasi musim tanam dan peluang double cropping. Banyak laporan menyebutkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan distribusi pangan kepada kelompok elit tertentu, sementara sebagian besar rakyat menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan yang layak (Noland, 2022)

Di tengah sanksi internasional yang semakin ketat, Korea Utara berupaya mempertahankan ketahanan pangannya melalui berbagai strategi, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara tertentu seperti Cina dan Rusia. Bantuan ekonomi serta impor pangan dari negara-negara ini menjadi faktor utama dalam mempertahankan suplai pangan domestik. Namun, hubungan ini sering kali bersifat asimetris dan selektif, di mana Korea Utara sangat bergantung pada mitra-mitra ini tanpa memiliki kontrol penuh atas keberlanjutan bantuan tersebut. Selain itu, strategi diplomasi rahasia digunakan untuk menghindari tekanan internasional dan menjaga stabilitas internal, meskipun strategi ini membuat Korea Utara tetap rentan terhadap dinamika geopolitik global. Dalam beberapa kesempatan, Korea Utara juga menolak bantuan dari

organisasi internasional untuk tetap menjaga kontrol politiknya atas distribusi pangan, yang semakin memperburuk kondisi masyarakatnya (Collins, 2012)

Kondisi ketahanan pangan di Korea Utara semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Kebijakan penutupan perbatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus berdampak besar terhadap impor pangan dan perdagangan internasional, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pasokan makanan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengusir pekerja bantuan asing serta diplomat, yang semakin membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2020, sekitar 59,2% populasi Korea Utara mengalami kerawanan pangan akibat kombinasi antara pandemi, sanksi internasional, serta kegagalan sistem distribusi pangan dalam negeri (Baquedano et al., 2020). Pembatasan ketat yang diterapkan juga menghambat distribusi bahan pangan ke daerah-daerah terpencil, memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan terhadap kelaparan dan malnutrisi. Dengan demikian, pandemi Covid-19 memperparah situasi krisis pangan yang telah berlangsung lama di negara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam upaya Korea Utara dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah isolasi politik dan ekonomi. Dengan menggunakan kerangka teori interdependensi, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Korea Utara memanfaatkan hubungan diplomasi dan strategi perdagangan untuk

mengatasi krisis pangan di tengah sanksi internasional. Dengan memahami lebih jauh bagaimana kebijakan politik dan diplomasi mempengaruhi ketahanan pangan di Korea Utara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dinamika ketahanan pangan dalam konteks negara dengan sistem politik yang tertutup serta sanksi internasional yang membatasi akses terhadap sumber daya pangan global. Pemahaman ini juga penting bagi komunitas internasional dalam merancang strategi bantuan yang lebih efektif guna mencegah semakin buruknya kondisi pangan di negara tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas muncul suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya Korea Utara dalam mempertahankan ketahanan pangan melalui kerjasama internasional?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan studi keamanan dalam bidang ketahanan pangan di negara yang memiliki sistem proteksionis yaitu Korea Utara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian adalah untuk memperdalam pemahaman tentang upaya sistem negara Korea Utara dalam menjaga ketahanan pangan dan menghadapi krisis pangan pada keamanan nasional negara tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu argumen referensi dan literatur terkait permasalahan krisis dan kondisi ketahanan pangan di Korea Utara oleh para peneliti, akademisi, pembaca dan Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Selain itu, penulis juga mengharapkan kebermanfaatan data yang sangat minim ini dapat membantu peneliti selanjutnya terkait kondisi politik Korea Utara dalam menghadapi tantangan pangan dan kerjasama - kerjasama yang digantungkan kepada beberapa negara aliansinya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meneliti dampak langsung dari kebijakan ketahanan pangan terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Korea Utara termasuk distribusi pangan, gizi, dan aksesibilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh pemerintah dan warga Korea Utara untuk bertahan hidup dibawah kebijakan ketahanan pangan yang ketat dan terbatas. Sehingga dapat menjadi konsiderasi atau acuan bagi

negara-negara berkembang yang menghadapi krisis pangan dengan situasi dan kondisi yang hampir sama dengan Korea Utara.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini terdapat penelitian Noland Marcus mengenai kompleksitas keadaan Korea Utara menghadapi keadaan darurat kemanusiaan yang didasarkan pada kerawanan pangan (Marcus, 2022). Situasi ini tercermin dalam data harga dan jumlah biji-bijian yang menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama diperparah oleh respons rezim yang mengisolasi diri terhadap pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina. Meskipun pasokan biji-bijian tampaknya telah turun di bawah kebutuhan minimum manusia, situasinya belum seburuk kelaparan tahun 1990-an dan tidak setingkat dengan kondisi di beberapa negara lain di dunia saat ini. Penting untuk diakui bahwa kerawanan pangan di Korea Utara bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga memiliki implikasi strategis yang signifikan. Dari perspektif para donor, tantangan terbesar adalah kurangnya akuntabilitas rezim Korea Utara, yang membuat bantuan sulit untuk menjadi alat efektif dalam mencapai tujuan diplomatik lainnya. Selain itu, dalam konteks ini, Korea Utara tidak tampak menjadi prioritas utama sebagai calon penerima bantuan, karena ada negara-negara lain yang mungkin membutuhkan bantuan dengan lebih mendesak.

Terdapat penelitian oleh Adkanian, Khosravi dan Atashkadeh (Adkanian et al., 2023). Mereka merangkum hasil dari berbagai penelitian yang mengkaji pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Fokusnya termasuk pelanggaran terhadap keamanan pangan, dimana pemerintah Korut menggunakan makanan sebagai alat kontrol dan hukuman massal. Investigasi PBB telah mengungkap bahwa pemerintah Korut telah mengalokasikan sumber daya besar untuk senjata pemusnah massal, sementara mayoritas penduduknya menderita kelaparan. Rekomendasi telah diajukan kepada PBB untuk merujuk kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna diadili, termasuk pemimpin Korut atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Penulis menegaskan pentingnya keberanian internasional dan kesadaran global dalam memastikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia serta pencegahan penindasan di masa depan.

Sementara itu penelitian Peter Ward mengungkapkan bahwa situasi krisis pangan di Korea Utara tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius (Ward, 2023). Para ekonom telah menyoroti kegagalan komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, menyalahkan manajemen yang buruk dan prioritas yang salah dalam pengelolaan sumber daya. Fokus pada proyek-proyek kepentingan politik daripada memperhatikan kebutuhan dasar rakyat, seperti yang terjadi dalam penanganan sektor pertanian, menyebabkan stagnasi dalam produktivitas dan kesejahteraan

petani. Di samping itu, dampak jangka panjang krisis pangan ini juga mengenai kesehatan anak-anak, dengan 62% anak di bawah usia 7 tahun mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan pangan yang berkelanjutan. Peter Ward menyoroti ketidakadilan dalam distribusi makanan yang menguntungkan golongan elit politik dan ekonomi, meninggalkan mereka yang rentan terdampak oleh krisis tersebut.

Penelitian sebelumnya juga telah berhubungan dengan pendapat Jisun Yi yang merupakan peneliti dari INSS (Yi, 2023). Meskipun beberapa orang mungkin berspekulasi bahwa masalah pangan akan sedikit teratasi setelah musim panen, peneliti menyebutkan fokus sebenarnya adalah pada hambatan aksesibilitas dan distribusi, bukan pada produksi pangan. Dengan penolakan akses dan pemantauan dari luar oleh pemerintah Korea Utara, situasi pangan di negara tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan isolasi dan kontrol pemerintah. Ini menunjukkan perlunya komunitas global untuk memperhatikan masalah ini dan merancang metode untuk mengurangi kemungkinan kelaparan atau kondisi yang mirip kelaparan di Korea Utara.

Selain itu berdasarkan laporan Human Rights Watch, kondisi pangan domestik yang dimiliki Korea Utara sangat tidak efisien produksinya apalagi program keamanan militer yang menjadi prioritas utama negara itu saat ini. Pemerintah berupaya menggunakan perdagangan resmi hingga tidak resmi seperti aktivitas perdagangan pihak swasta tanpa adanya izin dari pemerintah. Jurnal laporan ini memperlihatkan bagaimana

dampak pembatasan kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah Korea Utara selama pandemi Covid-19 sehingga menghalangi sumber pendapatan sebagian besar penduduk dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Namun, ditengah kondisi proteksionisme yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap dunia Internasional, ditemukan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan oleh Korea Utara dan Rusia hingga Cina melalui radar citra satelit yang hingga kini terus diteliti oleh badan intelijen Amerika dan Korea Selatan. Hal ini menandakan adanya pemberian pasokan pangan dan timbal balik kepada negara pemberi bantuan oleh Korea Utara. Secara keseluruhan, teks ini lebih menyajikan perspektif kritis mengenai tindakan pemerintah dan konsekuensinya terhadap situasi ekonomi dan kondisi kemanusiaan di Korea Utara.

1.5.2. Interdependensi

Kerangka aliran interdependensi menggambarkan dinamika hubungan antara negara-negara dalam konteks hubungan internasional. Aliran ini bersumber dari paradigma liberalisme-interdependensi yang menekankan pentingnya memahami sifat ketergantungan yang timbul saat aktor negara bekerja sama untuk mencapai efek timbal balik. Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye adalah tokoh utama yang memperkenalkan konsep ini. Mereka menyoroti bahwa dalam dunia global yang kompleks, negara-negara tidak bisa beroperasi secara terisolasi. Sebaliknya, mereka

saling tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam teori ini, kerja sama antar negara dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Hal ini terjadi ketika negara-negara berfokus pada isu-isu "low politics" seperti ekonomi, perdagangan, lingkungan, dan kesejahteraan, daripada isu "high politics" seperti keamanan dan kebijakan luar negeri yang lebih sensitif (Keohane & Nye Jr, 1973). Dengan berkolaborasi dan menghasilkan solusi bersama, negara-negara bisa mengurangi kerentanan mereka terhadap peristiwa global yang bisa mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masing-masing.

Analisis yang dilakukan oleh Tollison dan Willet pada tahun 1978 menggarisbawahi bahwa hubungan interdependensi membawa peningkatan signifikan dalam ketergantungan antar negara. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil oleh satu negara dapat memiliki dampak besar pada negara lainnya. Sebagai contoh, tindakan ekonomi seperti tarif perdagangan atau kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian negara lain dalam jaringan perdagangan global. Pemikiran ini juga menggarisbawahi bahwa interdependensi memiliki biaya dan tujuan yang harus dikeluarkan. Menurut Keohane dan Nye (1989), menjaga hubungan antara negara-negara memerlukan biaya dalam bentuk kesempatan, sedangkan konflik atau kekerasan bisa dianggap sebagai biaya yang memutuskan hubungan. Argumen ini juga didukung oleh Baldwin (1989) yang menyatakan bahwa hubungan interdependensi adalah tentang

kerentanan, di mana jika hubungan rusak, kedua belah pihak akan mengalami kerugian.

Interdependensi mengaitkan konsep ini dengan kesejahteraan dan keamanan dunia. Al-Mashat (1985) mengemukakan bahwa keamanan nasional tidak hanya sebatas pertahanan teritorial, tetapi juga terkait dengan kualitas hidup dan stabilitas sosial-ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kerja sama regional dan internasional menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan keamanan yang saling bergantung dengan keberlangsungan rezim politik dan kehidupan masyarakat. Semakin besar kebutuhan dasar rakyatnya, ketika suatu elit politik dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka akan semakin besar legitimasi dan stabilitas rezim tersebut. Dalam hal ini kerja sama regional dan internasional akan saling bergantung dengan keamanan nasional karena semakin besar tingkat hubungan kerja sama, sehingga menciptakan peluang stabilitas dan keamanan.

1.5.3. *Diplomacy dan Secrecy*

Menurut Harold Nicolson, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui beberapa metode terutama diplomasi yang disesuaikan dan diatur oleh perwakilan duta besar, utusan bisnis atau menjadi seni dalam peran diplomat itu sendiri (Nicolson, 1988). Diplomasi menjadi praktik hubungan internasional dengan melakukan komunikasi antara perwakilan dari berbagai negara. Praktik tersebut membutuhkan

beberapa strategi seperti taktik, dan protokol yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional sambil menjaga hubungan damai dan kerja sama. Adapun beberapa aspek penting dalam berdiplomasi yaitu negosiasi, komunikasi, dan mediasi (Satow, 2011). Komunikasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan bertukar antara negara-negara yang terlibat dalam memahami suatu pembahasan. Mediasi akan menjadi peran pihak ketiga yang netral dalam membantu menyelesaikan konflik ketika suatu permasalahan muncul antar negara. Sedangkan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Seni dalam mengelola negosiasi tersebut terkadang membutuhkan tingkat kerahasiaan tertentu untuk menumbuhkan kepercayaan, memfasilitasi negosiasi yang sensitif, serta untuk melindungi kepentingan nasional.

Diplomasi seringkali menjadi suatu aksi yang kompleks ketika dipertemukan dengan kerahasiaan tetapi kedua konsep tersebut saling terkait. Karena penggunaan diplomasi rahasia dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik, menjalin aliansi secara diam-diam, dan menjaga stabilitas global. Hannah Arendt, seorang filsuf dan teoritikus politik, menekankan bahwa kerahasiaan adalah elemen penting dalam diplomasi karena memungkinkan negosiasi yang jujur dan terbuka tanpa tekanan publik. Menurut Arendt, diplomasi memerlukan ruang untuk dialog yang bebas dari sorotan dan opini publik, sehingga para diplomat dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan mencapai kesepakatan yang

lebih baik. Kerahasiaan dalam diplomasi membantu mencegah distorsi informasi dan manipulasi oleh pihak ketiga, yang dapat merusak proses negosiasi. Adapun pengertian kerahasiaan tersebut yang dikutip dari Geoffrey Berridge dalam karyanya “Diplomacy: Theory and Practice” mengemukakan bahwa kerahasiaan merupakan elemen penting dalam berkomunikasi melalui diplomasi. Hal tersebut untuk menjaga negosiasi tetap berjalan dan menghindari tekanan publik yang mengganggu proses diplomatik, dimana keamanan nasional akan mudah terjamin bahwa informasi yang walaupun dapat membahayakan keamanan nasional masih bisa terlindungi (Berridge, 2015).

Di era transparansi kegiatan diplomasi dalam “diplomasi baru”, hingga saat ini masih sering dilakukan aktivitas diplomatik secara rahasia terutama dalam isu-isu politik tinggi seperti keamanan negara. Teknik diplomasi yang rahasia ini telah berkembang sejak era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang menggunakan pendekatan bilateral klasik dalam menangani masalah-masalah kritis. Relevansi diplomasi rahasia juga didukung oleh fakta bahwa meskipun diplomasi modern tampak sangat transparan, banyak negosiasi penting tetap dilakukan di luar jalur publik. Mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Robin Cook, menekankan bahwa sebagian besar negosiasi terjadi selama waktu istirahat dan di balik pintu tertutup. Contoh konkret dari praktek ini adalah ketika Tony Blair mengunjungi peternakan George Bush sebelum invasi Irak dan kemudian menjadi pendukung kuat invasi tersebut. Kasus ini

menunjukkan bagaimana diskusi-diskusi rahasia dapat mempengaruhi keputusan besar dan kebijakan internasional (T.Rourke, 1995).

Selain itu, meskipun ada peningkatan multilateralisme dalam isu-isu lingkungan, perdagangan, dan keuangan, yang biasanya diselesaikan dalam kerangka konferensi terbuka, isu-isu politik dan keamanan yang tinggi masih memerlukan pendekatan rahasia. Teknik diplomasi rahasia memungkinkan para diplomat untuk berdialog secara lebih bebas dan jujur tanpa tekanan publik, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, dan menghindari manipulasi oleh pihak ketiga yang dapat merusak proses negosiasi. Oleh karena itu, meskipun dunia diplomasi terus berkembang, kerahasiaan tetap menjadi komponen vital dalam menjaga efektivitas dan keberhasilan diplomasi internasional. Kerahasiaan ini akan memainkan peran penting dalam melindungi informasi dan memastikan bahwa strategi diplomatik dapat dilaksanakan tanpa gangguan dari pihak luar yang berisiko munculnya intervensi dari pihak lain ke dalam isu-isu sensitif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Interdependensi Asimetris

Konsep ketergantungan asimetris, adalah konsep yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku yang berjudul “Power and Interdependence”, dimana menggambarkan

hubungan ketergantungan yang tidak seimbang antara negara-negara dalam sistem internasional. Kedua negara akan tergantung satu sama lain dari segi kebutuhan dan keuntungan tetapi hubungan ini tidak sama, karena salah satu negara akan lebih bergantung dan ada yang lebih mendominasi atau memiliki kekuatan lebih tinggi. Keohane dan Nye menjelaskan bahwa hubungan interdependensi asimetris dapat menggambarkan hubungan politik antar negara, baik di level nasional maupun internasional (Keohane & Nye Jr, 1973). Hal ini disebabkan oleh perbedaan di antara negara-negara dalam penggunaan sumber daya, kemampuan teknologi, dan kemampuan politik. Teori interdependensi asimetris juga menjelaskan bahwa hubungan antar negara dapat berubah-ubah tergantung pada perilaku negara lain dan perubahan dalam lingkungan internasional.

Asimetris akan menekankan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan kapasitas antar negara menyebabkan perbedaan mendasar dalam cara pandang suatu negara terhadap kepentingan relatif mereka satu sama lain. Hal ini akan membuat kesalahan persepsi struktural yang mengarah pada kesalahpahaman dan berpotensi menjadi konflik. Negara-negara yang lebih kuat tidak bisa selalu memaksakan kehendak mereka pada negara negara yang lemah. Namun, negara yang lebih kuat ketika tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari negara yang lemah, mereka akan tetap menjaga hubungan bilateral secara asimetris tersebut dengan beberapa alasan tertentu. Salah satunya bertujuan untuk menjaga kestabilan

sekitarnya (Yesaya, 2016). Sebaliknya, terdapat capaian hubungan internasional yang relatif stabil ketika dilakukan pertukaran bantuan, meskipun tidak setara, dinegosiasikan berdasarkan kepentingan bersama dan otonomi. Bagi negara yang kurang dominan, penting untuk selalu menjaga hubungan karena hubungan internasional dengan negara yang lebih dominan karena akan menguntungkan. Hal ini dilakukan karena ada bantuan atau jenis insentif yang diberikan oleh negara yang dominan, sehingga negara dapat menutupi kekurangan kebutuhan hidup domestik mereka. seringkali lebih penting dan memerlukan perhatian khusus karena berpeluang terpapar risiko seperti sanksi maupun pembatasan lainnya (Womack, 2004, 351-366).

Hubungan Asimetris pada dasarnya terdiri dari dua atau lebih definisi. Hubungan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalkan antara dua negara yang memiliki kemampuan ekonomi, ketahanan pangan, hingga militer yang berbeda, antara dua orang aktor dengan jenis atau tingkat kekuasaan yang berbeda, serta antara aktor yang memiliki tingkat pengaruh yang berbeda satu sama lain. Hal ini didukung oleh hubungan antar dua aktor menurut Womack, bahwa hubungan yang didasarkan pada keharusan timbal balik tetapi berbeda dari masing-masing pihak akan menghasilkan hubungan yang asimetri. Sehingga, walaupun hubungan tersebut tidak seimbang, artinya kerjasama yang dilakukan tidak selalu berarti ada dominasi yang mutlak satu pihak atas pihak lainnya.

Agar hubungan asimetris dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengakuan ketidakseimbangan dengan berbagai jenis tingkat kekuatan, kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Sehingga pada realitasnya ketika kepentingan ketahanan pangan dikaitkan dengan alur politik antara pihak eksternal dan negara tuan rumah yang dalam hal ini adalah Korea Utara. Berarti negara eksternal setuju untuk menyediakan sumber daya, bantuan, pelatihan kepada negara tuan rumah dan sebaliknya, Korea sebagai negara tuan rumah akan setuju untuk memberikan informasi terkait kebutuhan intelijen, kesetiaan, atau hanya komitmen terhadap program dari negara yang ingin bekerjasama. Ada dua konsep yaitu saling ketergantungan dan asimetris. Namun, penggambaran hubungan dimana dua negara atau lebih bergantung satu sama lain tetapi pada tingkat yang berbeda, inilah yang disebut saling ketergantungan asimetris. Komitmen yang dibuat satu sama lain akan berbeda dan satu negara akan lebih bergantung dengan yang lain serta sebaliknya. Mereka akan tetap saling bergantung, tetapi tingkat ketergantungan menjadi asimetris.

Penelitian ini lebih mengkaji bagaimana alasan dibalik dinamika negara yang kuat dan negara yang lemah saat bekerja sama melalui lensa saling ketergantungan asimetris. Penggunaan logika perpecahan antara pihak yang kuat dan lemah tidak akan digunakan. Saling ketergantungan asimetris akan digambarkan sebagai dinamika hubungan antara Korea Utara dan beberapa negara kerjasama seperti Cina dan Rusia sebagai alat

analisis untuk memahami hubungan tersebut dalam kepentingan Korea Utara yaitu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan di negara tersebut. Penulis menggunakan ketergantungan ekonomi dalam penyediaan bahan pangan yang disediakan oleh Cina dan Cina yang mempertahankan pengaruh politik sebagai sekutu yang dapat diandalkan dalam konteks geopolitik secara regional maupun global. Disisi lain, konsep ketergantungan asimetris dapat digunakan pada kasus krisis pangan Korea Utara yang memanfaatkan kondisi tersebut sebagai alat negosiasi kepada Cina dan Rusia. Rusia salah satunya menjadi agen kerjasama militer dan informasi intelijen yang dapat menguntungkan kondisi strategis kebutuhan perang dan bentuk informasi. Korea Utara akan menggunakan hubungan ketergantungan asimetris ini untuk mendapatkan sumber pangan serta proyek-proyek infrastruktur yang akan mempermudah akses pangan masuk ke dalam wilayahnya.

1.6.1.2. Interdependensi Selektif

Ketergantungan selektif merujuk pada kondisi di mana negara-negara atau aktor-aktor saling terhubung melalui efek timbal balik, tetapi efek ini terbatas pada isu atau area tertentu saja untuk kepentingan bersama (Baldwin, 1980). Konsep ini berbeda dari pengertian ketergantungan yang lebih luas, yang mencakup berbagai macam interaksi antar negara atau aktor. Hubungan ini dapat dicirikan oleh ketergantungan asimetris, di mana satu aktor lebih bergantung pada aktor lain untuk isu

tertentu, tetapi belum tentu pada semua isu. Ketergantungan selektif menyiratkan bahwa hubungan antar aktor berfokus pada isu atau domain tertentu, seperti perdagangan, keamanan, atau perlindungan lingkungan. Ketergantungan selektif dalam hubungan internasional terjadi ketika negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam bidang atau sektor tertentu namun tetap mempertahankan otonomi atau kemandirian dalam bidang lainnya. Negara tidak sepenuhnya otonom dalam segala hal, tetapi mereka akan mengidentifikasi hingga menyeleksi sumber ketergantungan berdasarkan strategi tertentu untuk mencapai keamanan nasional mereka.

Salah satunya dalam mengatasi keamanan pangan dimana negara Korea Utara menjalin kerjasama di tengah tengah tekanan eksternal, negara ini menggunakan ketergantungan terbatas untuk mencapai tujuan strategis ketahanan pangan mereka. Korea Utara juga mempertahankan kebijakan lainnya seperti kebijakan nuklirnya yang menjadi kontra bagi negara-negara lain sehingga menimbulkan embargo secara besar-besaran di negara tersebut. Menurut Keohane dan Nye (1977), negara yang berhubungan dengan ketergantungan akan sengaja memilih sekutu tertentu untuk mempertahankan bidang-bidang utama kepentingannya ketika mereka terjebak dalam sanksi internasional atau situasi yang menghambat pertahanan mereka. Korea Utara mencerminkan fenomena ketergantungan selektif yang ditunjukkan pada strateginya dengan menjalin aliansi dengan sekutu yang selalu membantunya seperti dari Cina dan Rusia dalam bantuan pangan ke negara tersebut. Strategi ini digunakan dengan

pendekatan yang lebih fokus dan selektif dalam memilih mitra kerjasama untuk mengurangi kerentanan dan krisis pangan serta meningkatkan stabilitas dalam negeri.

1.6.2. Definisi operasional

1.6.2.1. Interdependensi Asimetris

Dalam mengukur efektivitas ketergantungan asimetris yang terjadi pada strategi ketahanan pangan di Korea Utara yaitu dengan ketergantungan pangan dimana negara ini sangat bergantung pada impor pangan dari negara sekutunya misalkan Cina dan Rusia untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Karena menurut laporan dari WFP, Korea Utara mengalami defisit pangan kronis sehingga akan sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Selanjutnya adalah ketergantungan perdagangan, dalam hal ini Cina dan Rusia menjadi mitra dagang utama Korea Utara. Korea Utara akan mengekspor sebagian besar kebutuhan negara mitra seperti batu bara, dan mineral lainnya. Pengiriman senjata juga turut dilakukan oleh Korea Utara kepada Rusia dengan melakukan kerjasama secara diam diam karena akan menimbulkan kritik dari dunia Internasional yang dianggap kerjasama diplomatik tersebut belum sepenuhnya legal.

1.6.2.2. Interdependensi Selektif

Definisi operasional Ketergantungan Selektif Korea Utara pada Cina dan Rusia dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, peningkatan volume perdagangan bilateral, terutama komoditas pangan dan energi,

menunjukkan ketergantungan ekonomi pada kedua negara tersebut. Kedua, penerimaan investasi langsung dari Cina dan Rusia dalam sektor pertanian, infrastruktur logistik, dan energi memperkuat ketergantungan ini. Ketiga, bantuan pangan, pupuk, dan teknologi pertanian dari kedua negara tersebut menjadi indikator penting dalam mengamati ketergantungan selektif. Keempat, peningkatan intensitas kunjungan diplomatik, perjanjian bilateral, dan dukungan politik dari Cina dan Rusia dalam forum internasional terkait sanksi dan keamanan pangan menunjukkan ketergantungan politik. Korea Utara memilih negara partner yang konsisten dalam memberikan bantuan pangan dan yang memiliki sejarah aliansi yang kuat. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi kerentanan pangan dan meningkatkan stabilitas domestik. Kerjasama ini seringkali dilakukan melalui saluran diplomatik yang terbatas dan spesifik untuk memastikan bantuan pangan dapat terus berlanjut tanpa mengorbankan posisi politik atau kebijakan lainnya.

1.7. Argumen Penelitian

Peneliti berargumen bahwa kerjasama internasional masih dapat berlangsung ketika sebuah negara mendapatkan sanksi embargo secara internasional. Dalam hal ini Korea Utara yaitu suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang tertutup dan proteksionis serta dibatasi oleh negara lain sistem perdagangan dan politiknya, negara tersebut masih bisa melakukan kerjasama internasional dan berjuang dalam mempertahankan keamanan pangannya dengan strategi interdependensi. Karena terdapat ketidakseimbangan kapasitas ketahanan

pangan sehingga menyebabkan negara tersebut terpaksa dalam interdependensi asimetris dan secara selektif memilih kriteria tertentu untuk menjadikan sekutunya adalah partner kerjasama yang baik dalam membantu pasokan dan bantuan ketahanan pangan Korea Utara. Tentunya proses kerjasama turut dilakukan oleh Korea Utara yang mengrahasiakan kerjasama diplomasi dengan pihak partner agar tetap berjalan dan bertujuan untuk menghindari kecaman internasional seperti kerjasama perdagangan yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB secara legal.

1.8. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat memahami fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data, observasi, dan menafsirkan data dengan menganalisis dokumen, kemudian dikaji lebih lanjut secara tematik atau menggunakan strategi seperti menganalisis studi kasus bersifat deskriptif atau naratif (Creswell, 2012). Hasil analisis akan membentuk deskripsi dari investigasi dengan fokus observasi suatu individu atau kelompok dan dalam hal ini mengobservasi suatu negara. Pengumpulan data akan dipilah sesuai dengan data yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak relevan (Moleong, 2016). Dalam penelitian situasi ketahanan pangan di Korea Utara akan dikelompokkan data-data hambatan dan upaya yang dilakukan oleh negara tersebut dalam mengatasi masalahnya. Kategori-kategori kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pangan Korea Utara di tengah politik yang tidak stabil akan dikelompokkan dan dilakukan reduksi data hingga penyajian data. Metode kualitatif bermanfaat dalam menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, memungkinkan peneliti

untuk mengembangkan teori yang relevan, serta adanya fleksibilitas yang aktif dari subjek penelitian sehingga masalah yang kompleks juga dapat dikaji melalui metode ini (Sugiyono, 2013).

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penggunaan deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis dan jelas terkait fakta-fakta atau karakteristik dari objek penelitian (Nawawi, 1990). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan penelitian ini dengan konsep yang diteliti yaitu konsep Interdependensi Asimetris dengan Interdependensi Selektif agar menghasilkan kesimpulan yang memiliki keterkaitan dengan ketidakstabilan politik Korea Utara dalam menghadapi krisis pangan di tengah sanksi ekonomi internasional dengan negara negara yang bekerjasama dan mendukung Korea Utara dengan timbal balik yang beragam. Penelitian ini nantinya tidak fokus menguji hipotesis atau memprediksi hasil, tetapi lebih berfokus dengan situasi yang ada atau sesuai dengan realita.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di domisili penulis pada saat mencari data yaitu Semarang, Jawa Tengah dan di perpustakaan Departemen Hubungan Internasional, dan FISIP Universitas Diponegoro karena penelitian ini melalui pencarian data

dan referensi seperti buku, jurnal, dokumen, laporan akademik, situs-situs resmi, dan sumber data lainnya.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berkaitan dengan Korea Utara sebagai subjek utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, dan negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama seperti Cina dan Rusia. Beberapa negara tersebut telah membantu dan memperdalam hubungan kerjasama Korea Utara ditengah sanksi ekonomi internasional dan kondisi politik Korea Utara yang tidak stabil.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung dari buku, jurnal, artikel terpercaya, dan data yang dikutip dari media massa dan data statistik beberapa pihak seperti media domestik, regional, Internasional yang merepresentasikan peristiwa penelitian terjadi.

1.8.5. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam mendukung penelitian di atas adalah dengan data sekunder. Karena subjek utama yang diteliti Korea Utara, dimana negara ini jarang mempublikasi data statistik dan aspek lain di negara tersebut. Sehingga sumber data yang didapat berdasarkan review buku, jurnal, data laporan penelitian, media massa yang relevan dan menganalisis data citra satelit untuk

kerjasama Korea Utara dan negara aliansinya serta indikator ekonomi lain dari sumber organisasi internasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan memperdalam sumber dengan teknik *library research* melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian sebelumnya, teori-teori yang ada, serta temuan-temuan yang relevan. Studi pustaka sendiri menjadi pendekatan yang lebih terstruktur dan fokus dalam mencari, memilih dan menganalisis literatur, seringkali teknik ini dilakukan untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik (Creswell, 2012). Selain itu, peneliti menggunakan metode yang berbasis internet sehingga memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses gambar dan penjelasan pada situs web domestik dan internasional. Situs web juga memanfaatkan pencarian mengenai pernyataan resmi yang direpresentasikan menjadi sumber data, berita berita, artikel ilmiah, jurnal dan laporan penelitian hingga sumber-sumber data internet lainnya yang kredibel

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan Interpretasi data yang digunakan peneliti adalah dengan analisis konten yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam berbagai jenis data termasuk dokumen resmi, pidato politik pemerintah, laporan

berita, artikel ilmiah, hingga konten media yang langka dari Korea Utara. Holsti menekankan penggunaan analisis ini untuk memahami makna tersirat dalam komunikasi, motif, nilai dan keyakinan komunikator sehingga potensi analisis ini dapat mengungkap bias tertentu, dan agenda politik di balik pernyataan resmi atau laporan intelijen yang terbatas (Holsti, 1969). Hal tersebut akan membantu memahami bagaimana pemerintah Korea Utara menggambarkan situasi ketahanan pangan dan upaya negara tersebut menanganinya. Data juga dapat dikombinasikan dengan sumber data lain walaupun terbatas, seperti statistik resmi yang dirilis oleh Korea Utara, hingga negara yang mengawasi atau mata mata seperti Amerika Serikat hingga Korea Selatan. Laporan dari organisasi internasional yang memiliki akses terbatas ke negara tersebut. Kombinasi berbagai data disebut triangulasi data yang membantu memperkuat validitas temuan penelitian.

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang relevan dan berkualitas melalui buku, jurnal, artikel, laporan resmi, penelitian sebelumnya, surat kabar dan media yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berkomitmen dalam memastikan kriteria serta kualitas data yang empiris dan teoritis, sehingga akan menjelaskan upaya ketahanan pangan Korea Utara dan kerjasama internasional pada saat embargo internasional berlangsung.